

# RADIKALISME RELIGION POLITIK DI JAWA TENGAH

(*Religio Political Radicalism In Central Java*)

Sutoto HG

(Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Tengah)

## ABSTRACT

Religio Political Radicalism is an ideology to apply *syariat* Islam in political life through violence either formal or informal. Religio politic strengthens its power and politics in religious life, upholding Islam as jihad by using violence. Radicalism movement appeared because of strong motivation caused by frustration, threat, and successful Islamic romantism, that emerge the implementation of *syariat* Islam. The chosen model are religious imaging cultural domination and the role of media. The result of this research are socio political and campus enviroment will be rapid growing of campus radicalism. The second trust crisis to the goverment caused by bad socio economic condition. Third lessoning trust to religious prommert figure and religious organization because of then for deviation from Islamic spirit and morality. To eliminate radical movement could be taken by these steps : (a) policy that prefer option of the poor and maintain justice in the society. (b) participative dialogic communication between the people and the government. (c) good example from religious prommink frame and beaurocrats (d) political education.

**Keywords :** *radicalism, religio political, Islam*

## PENDAHULUAN

Agama adalah sumber dari suatu keyakinan dan pengetahuan sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab yang diyakini dan dipahami oleh para pemeluknya dan diekspresikan dalam perilaku kehidupan keagamaan. Dalam proses pemahaman, agama tidak hanya dijadikan sumber tatanan kehidupan sesuai syariatnya, tetapi juga dijadikan acuan kehidupan berorganisasi dan berpolitik terutama kelompok atau organisasi yang mengarah kepada terbentuknya negara Islam dengan keinginan untuk mewujudkan syariat Islam sebagai tatanan sosial dalam bernegara.

Upaya untuk mewujudkan keinginan tersebut diwujudkan melalui berbagai saluran

baik formal maupun informal. Desakan untuk mewujudkan rencana yang berkesinambungan di berbagai daerah khususnya di Jawa Tengah yang memiliki tingkat pluralitas yang tinggi baik dari segi suku, agama, ras dan antar golongan dilakukan dengan berbagai cara bahkan dengan kekerasan.

Munculnya pandangan yang ingin merubah ideologi negara dari negara Pancasila menjadi negara Islam dari satu sisi, dan kenyataan penduduk Jawa Tengah yang pluralis dalam sisi yang lain, sering menimbulkan radikal konflik yang ekspresif di berbagai daerah di Jawa Tengah. Pandangan radikal yang diikuti dengan gerakan kekerasan dalam mewujudkan tujuan memberlakukan syariat Islam itulah yang melatar belakangi munculnya radikalisme religio

politik di Jawa Tengah. Kondisi demikian akan berbahaya karena melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan ajaran agama dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila.

Oleh karena itu, yang menjadi perhatian penelitian ini adalah bagaimana para pemeluk agama itu memakai agama dan kewajiban keagamaan dalam konteks sosial politik untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis antar umat beragama.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pencitraan kegamaan ormas-ormas/orsospol-orsospol dalam konteks sub-sub budaya Jawa;
2. Bagaimana karakteristik radikalisme religio politik di Jawa Tengah;
3. Upaya-upaya apa yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi timbulnya gerakan radikal yang destruktif pada kegiatan religio politik.

Secara umum tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Memahami pandangan, sikap-sikap dan tindakan-tindakan keagamaan yang bercorak adaptif dalam satu segi, dan yang maladaptif dari segi yang lain dalam konteks kehidupan bersama;
2. Mengetahui alasan mengapa berpandangan, bersikap dan bertindak secara radikal dalam kehidupan sosial keagamaan menurut pandangan aktor (pelaku) maupun pihak lain.
3. Mengetahui mengapa radikalisme itu tumbuh dan berkembang di Jawa Tengah, apakah kondisi sosial politik, ekonomi maupun budaya yang memicu sikap radikal dan memacu pertumbuhan dan perkembangan radikalisme religio di Jawa

Tengah.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui logika sebagai berikut :

1. Dengan dipahaminya pencitraan kegamaan dari orams/orsospol dalam konteks sub-sub budaya Jawa, maka pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah mudah menggalang koordinasi dan komunikasi dialogis.
2. Dengan dipahaminya karakteristik radikal khususnya yang destruktif, khususnya di lokus-lokus tertentu maka pihak yang berwenang (terutama pemerintah) akan mudah mengantisipasi dan menangani tumbuh dan berkembangnya tindakan-tindakan radikal yang diatasnamakan agama.
3. Sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan penanganan Radikalisme.

## BAHAN DAN METODA

Penelitian ini mempelajari fenomena sosial politik keagamaan yang menunjukkan gejala radikalisme, dari peristiwa, tindakan dan sikap, strategi dan praktek pelaksanaan serta filosofi yang mendasarinya. Yang menjadi lokus penelitian adalah wilayah budaya pesisiran dan wilayah budaya pedalaman yang dijadikan dua kelompok yaitu *negerigung* dan *mancanegari*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Kelompok sasaran penelitian ini adalah pengurus dan warga dari institusi keagamaan yang menunjukkan kecenderungan pada semangat radikal atau fundamentalis, dan institusi politik (partai politik) yang secara resmi berasaskan Islam, bukan Pancasila. Kategori kedua adalah institusi keagamaan yang bercorak moderat dan adaptif terhadap kemajemukan ideologi, serta

institusi politik yang dilahirkan oleh sekelompok muslim tetapi berasaskan Pancasila serta bersifat terbuka.

Secara holistic, dalam memahami gejala-gejala sosial keagamaan dilihat dari berbagai aspek yang relevan diukur dengan menggunakan pandangan dari dalam sebagai perwujudan persepektif emik, dan proses pemahamannya dilakukan secara interpretative yaitu mendasarkan pada pengetahuan, keyakinan, tradisi serta pilihan-pilihan tindakan menurut keyakinan keagamaan dan kebudayaan masyarakat yang diteliti. Bertolak dari gambaran diatas, maka akan diperoleh sosok rinci radikalisme religio politik yang merupakan kejelasan gambaran dari dalam dan gambaran dari pandangan-pandangan pihak luar, inilah yang disebut intersubjektivitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan lapangan, secara berturut-turut dapat dipaparkan gambaran hasil penelitian tersebut, yaitu :

### 1. Radikalisme dalam *Setting Budaya Negarigung dengan kasus daerah Surakarta;*

Munculnya radikalisme keagamaan merupakan persoalan yang kompleks, karena hal tersebut mencakup berbagai dimensi kehidupan seperti keyakinan, interpretasi ajaran, hubungan antar manusia, dan hubungan antar kelompok organisasi keagamaan. Temuan lapangan dalam wilayah Surakarta, terdapat delapan kelompok organisasi kemasyarakatan berasaskan Islam yang masuk kategori radikal, yaitu:

- (a). Laskar Santri Hizbulah Sunan Bonang; (b) Brigade Al Islah; (c). Gerakan Pemuda Ka'bah; (d). Front Pemuda Islam

Surakarta (FPIS); (e) Brigade Hizbulah; (f). Laskar Jihad Ahlus Sunnah Waljama'ah; (g). Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI); (h). Pesantren Hidayatullah.

Meskipun metode, aktivitas dan model sosialisasi sangat beragam, namun secara mendasar dapat ditarik benang merah bahwa sesungguhnya fanatisme keagamaan adalah sebagai acuan utamanya. Bagi kelompok tersebut Islam adalah syari'at dan ibadah, dakwah sekaligus jihad, agama sekaligus negara, dan gerakannya merupakan kewajiban amalan keagamaan.

Berdasarkan statemen dari berbagai nara sumber dapat disimpulkan isu-isu yang melatarbelakangi munculnya organisasi keagamaan di wilayah Surakarta antara lain adalah : (a). Rasa keprihatinan umat Islam atas tercabiknya ukhuwah Islamiyah pada saat ini, (b). Rapuhnya hukum positif (hukum manusia) dalam mengatasi semua persoalan; (c). Pembantaian secara biadab terhadap kaum muslimin di berbagai daerah (Ambon, Maluku) dan negara-negara barat; (d). Skenario kafir internasional terhadap muslimin untuk menghancurkan akidah Islamiyah; (e) Kristenisasi yang dinilai licik dan menghalalkan segala hal; (f). Kondisi mental masyarakat yang materialistik, dengan menghalalkan segala cara; (g). Memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya untuk menegakkan Islam dan kaum Muslimin (Li'zatul Islam wal muslimin); (h). Semangat untuk melakukan pembelaan terhadap Islam melalui pemurnian ajaran dan pemberlakuan sya'riat Islam.

### 2. Radikalisme dalam *Setting Budaya pesisiran dengan kasus dengan Tegal, Jepara dan Pekalongan* Pencitraan keagamaan bagi orang-orang

Jawa Pesisiran pada umumnya dimaknai sebagai suatu identitas atau jatidiri, pada sisi lain agama dimaknai sebagai sarana perjuangan. Sebagai identitas, agama mengarahkan pemeluknya kepada ciri-ciri komunitas keagamaan sesuai dengan aliran keagamaan yang dianutnya. Sebagai perjuangan, berarti pemeluk agama (muslim) itu harus berusaha memperjuangkan apa yang diidealismekan dan berani untuk bersikap menolak berbagai kebijakan dan implementasi kebijakan yang dianggap mengancam atau bertentangan dengan moralitas keagamaan Islam. Memperjuangkan penerapan syariat Islam dan menolak ketidakadilan sebagai implementasi dari konsep "amar ma'ruf nahi munkar".

Masyarakat di wilayah pesisir Jawa bagian utara umumnya adalah masuk kategori kaum Islam santri, mereka beragama Islam aliran ahlus sunnah wal jamaah. Dalam kegiatan ekonomi umumnya bergerak dalam sektor swasta, yang mau menjadi pegawai negeri sangat sedikit. Karena itu ketika muncul faham *monoloyalitas*, dimana pegawai negeri sebagai kaum priyayi adalah anggota Golkar, maka melahirkan polaritas kehidupan sosial masyarakat pesisir terutama daerah santri. Sehingga pada masa orde baru, terjadi pemilahan antara kaum santri (rakyat biasa) yang bernaung dalam organisasi politik keislaman dan kaum priyayi yang direpresentasikan lewat partai Golkar. Dengan kondisi demikian maka kaum santri merasa terabaikan dan bangkit menjadi sikap yang moderat sesuai dengan pembawaan faham *ahlus sunnah wal jamaah* yang diusung oleh NU dengan prinsip tasamuh (toleran) dan tawasuth (demokratis) dan tawazun (jalan tengah). Sikap radikal menjadi faham jihad li I'la kalimatillah (berjihad untuk menegakkan Agama Allah). Melalui bahasa jihad itulah mereka siap

menghadapi kekerasan dengan kekerasan atau memilih jalan kekerasan untuk menghadapi ancaman. Hal ini terjadi di Dongos, Jepara, dan Pekalongan antara pendukung PPP melawan pendukung Golkar (pada masa akhir pemerintahan orde baru) merupakan perwujudan cara mereka mencitrakan jati diri keagamaan (kaum santri) yang berhadapan dengan kelompok priyayi (pemerintah) yang berupaya menjaga kehormatan dan kelestarian kekuasaannya. Sedang kekerasan sosial yang terjadi antara pendukung PPP dengan pendukung PKB baik yang muncul di Jepara maupun Pekalongan, bukan semata-mata alasan keagamaan, tetapi hanya alasan konflik antar kelompok. Bagi kaum santri (NU) agama dan politik merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Dengan demikian sikap militansi bisa tumbuh dan berkembang disebabkan karena cara menyampaikan informasi maupun kemampuan mengolah informasi pada sisi yang lain menjadi suatu keputusan yang sesuai dengan kebenaran yang dianutnya.

### 3. Radikalisme dalam *Setting* Budaya Mancanegari dengan kasus daerah Wonosobo dan Banyumas

Masyarakat Banyumas dan Wonosobo adalah masyarakat yang hidup dalam lingkaran budaya *mancanegari*, namun dalam kehidupan berbudaya dan beragama mirip dengan masyarakat yang berbudaya *negarigung* seperti masyarakat Surakarta dan Yogyakarta. Masuknya pengaruh agama Islam mempengaruhi cara pandang dalam pemahaman Islam. Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, ajaran yang mengandung nilai-nilai universal, mengatur tata kehidupan manusia dalam bertindak dan berperilaku. Oleh karena itu Islam yang dijadikan cita-cita hidup dan kehidupan manusia

mudah mendapatkan tempat di masyarakat.

Dalam perkembangannya, muncul pengikut Islam yang mempunyai pandangan radikal. Adanya pandangan kekerasan dan tindakan yang radikalistik dengan mengatasnamakan sebagai kewajiban dalam beragama juga muncul di daerah Banyumas, tetapi dapat diduga pandangan dan tindakan radikalisme itu bukanlah berasal dari ormas/orsospol yang sudah lama diikuti warga di daerah Banyumas, seperti FPI, Hizbut Tahrir dan Al Irsyad. Diantara ketiga ormas itu, FPI adalah lebih menonjol tingkat radikalismenya, sedangkan Hizbut Tahrir dan Al Irsyad memang menyepakati berlakunya syariat Islam, tetapi hanya untuk kalangan umat Islam sendiri. Karena itu tuntutannya bukan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi Indonesia perlu memberikan kesempatan yang luas kepada umat Islam untuk menjalankan syariatnya.

#### **4. Karakteristik Radikalisme Religio Politik di Jawa Tengah Radikalisme Ideologis**

Konsep radikalisme religio politik dalam konteks Indonesia adalah menempatkan sifat radikalisme dalam kemajemukan, sebagaimana kemajemukan atau keragaman keagamaan yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kehendak penerapan syariat Islam di negara yang majemuk baik etnis maupun keagamaannya adalah tidak relevan, dan merupakan tindak kekerasan dibidang ideologi apabila dipaksakan penerapannya bagi seluruh warga negara Indonesia.

##### ***Radikalisme Keagamaan***

Radikalisme keagamaan yaitu pandangan, sikap dan tindakan yang menghalalkan cara-cara kekerasan untuk

mencapai tujuan, yaitu memberlakukan (syariat Islam) dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi atau kelompok keagamaan yang menghendaki berlakuknya syariat Islam di lingkungannya walaupun dalam lingkungan masyarakat yang majemuk baik etnis maupun agamanya dengan cara-cara yang dianggap sebagai kewajiban keagamaan, maka akan berakibat terjadinya konflik dalam masyarakat. Organisasi keagamaan yang muncul antara lain Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir, Al Irsyad, Ihwanul Muslimin, Laskar Jihad.

##### ***Radikalisme Gerakan***

Sikap radikal atau potensi menjadi radikal secara psikologis dapat dijelaskan dari dua segi, *pertama*, radikalisme religio politik dapat diduga terjadi karena dorongan emosi yang kemudian melahirkan semangat keagamaan yang tidak terkontrol, mengapa demikian, dalam kaitannya dengan religio politik, sudah barang tentu model penafsiran terhadap Islam akan ikut menentukan seseorang atau kelompok dalam menilai dunia sekelilingnya. Seseorang yang melihat kebenaran agama hanya dari makna literal dari teks-teks suci keagamaan, maka visi tentang dunia yang mengitarinya akan dibentuk oleh makna teksual yang ada dalam teks tersebut. Hal ini akan sangat berbeda dengan orang yang melihat konteks sosio-historis saat melakukan penafsiran. Proses pemaknaan yang dilakukannya akan membentuk pemahaman keagamaan yang kontekstual pula; *kedua*, karena adanya konflik nilai. Untuk mengetahui seberapa jauh konflik

nilai yang terjadi pada kelompok-kelompok keagamaan, dibawah ini akan digambarkan ringkasan dari model pemahaman dalam memenuhi ajaran Islam sebagaimana ditemukan di lapangan, baik yang dikatakan secara eksplisit maupun yang hanya tersirat, dapat diringkas sebagai berikut:

1. Islam sebenarnya menjadi dasar keyakinan ideologis baik dalam kontek individual maupun dalam kontek kehidupan sosial, sedangkan Qur'an dan hadist merupakan dua sumber ajaran yang mengikat bagi seluruh umat Islam.
2. Hukum Islam harus didasarkan pada Qur'an dan Hadits Nabi yang keduanya merupakan *blue print* bagi kehidupan Muslim.
3. Ketaatan terhadap Islam harus disertai dengan kesediaan untuk menerima semua ajaran secara total (kafah). Kesejahteraan kaum Muslimin hanya dapat terwujud apabila seluruh ajaran Islam dilaksanakan dengan baik.
4. Negara harus diorganisir sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan Tuhan di bumi.
5. Kelemahan masyarakat Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim karena mereka sudah tidak lagi melaksanakan ajaran Islam dengan baik.
6. Penyembuhan rasa ketidakpercayaan diri dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi harus dilakukan dengan cara kembali kepada ajaran Islam yang murni.

Dari gambaran diatas, dapat diprediksi apa yang bisa terjadi jika seseorang atau suatu kelompok memiliki anggapan seperti itu dengan melihat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat muslim, maka dapat diduga pasti terjadi konflik nilai. Dengan kata lain radikalisme religi politik akan berubah menjadi bentuk kekerasan fisik sebagaimana beberapa kasus yang terjadi di Surakarta dan tempat lain yang dilakukan oleh FPIS dan tempat lain oleh organisasi yang sejenis.

## SIMPULAN

Pencitraan keagamaan khususnya agama (Islam) oleh para pemeluknya akan ditentukan oleh latar belakang budaya dan pendidikanya. Seseorang atau kelompok yang memahami agama hanya dari makna-makna literal dari teks-teks keagamaan, maka visi tentang Islam akan terbentuk sesuai dengan teks tersebut. Pemahaman keagamaan secara teologis normative, dan targetnya adalah pemahaman keagamaan sesuai dengan ajarannya, bukan bagaimana cara dan metoda mempelajari suatu ajaran, akibatnya tumbuh visi keagamaan yang monolotik. Mereka berpendapat bahwa pemberlakuan syariat Islam bagi warga negara adalah ajaran agama. Berbeda dengan orang atau kelompok yang memahami konteks agama dalam konteks sosio historis, maka akan menghasilkan pemaknaan dan pemahaman yang kontekstual pula.

Pemahaman yang diperoleh melalui pendekatan normatif teologis dan rasional serta ilmu sosial lainnya akan melahirkan pola pemikiran keterbukaan sikap yang mau menerima kebenaran penafsiran atau pencitraan orang atau kelompok lain. Pemahaman bagi

kelompok ini akan melahirkan konsep hidup kebersamaan dalam masyarakat plural, baik etnis maupun agamanya, walaupun tetap dalam konteks amar maruf nahi munkar.

Karakteristik religio politik yang ada di Jawa Tengah ada beberapa macam, tergantung budaya dan cara pemahamannya. Persoalan radikalisme memang merupakan persoalan yang sangat kompleks karena mencakup berbagai aspek kehidupan seperti keyakinan, ideologi, pemahaman ajaran agama, hubungan sosial kemasyarakatan dan budaya setempat. Radikalisme religio politik yang dilahirkan oleh organisasi sosial keagamaan. Cenderung mencapai tujuan ideologynya melalui organisasi atau partai politiknya. Misal Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang Reformasi, Partai Bulan Bintang. Meskipun berlatar belakang masalah politik, namun kenyataan munculnya sikap radikalisme disebabkan karena faktor pemahaman keagamaan yang ada di masyarakat.

Radikalisme yang muncul dari struktur budaya, seperti budaya negarigung, mancanegari dan pesisiran akan berbeda tindakannya. Karakter budaya negarigung adalah kehalusan baik perilaku, bahasa maupun kesenian, namun kenyataan dari kawasan negaringung banyak organisasi keagamaan yang berwatak radikal. Budaya Jawa yang dipengaruhi oleh budaya hindu melahirkan tradisi kejawen sebagai budaya negarigung. Adanya pemahaman Islam yang tekstual dan dianggap ajaran yang murni, menganggap tradisi kejawen dan pola kehidupan yang tidak sama dengan ajaran mereka dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni.

Radikalisme yang dilahirkan dari kalangan intelektual, hal ini terjadi karena pemahaman ajaran Islam yang bersumber dari teks-teks suci

keagamaan. Kesadaran beragama kaum intelektual secara otodidak mempelajari buku karya intelektual muslim kontemporer yang berhaluan keras, misal Al Maududi, pendiri Jama'at al Islam di Pakistan, Hasal al-Bama, pendiri Ikhwan al-Muslimun di Mesir, dan masih ada beberapa penulis keras seperti Muhammad Quth, Sayyid Qutb, Abdul Qadir'audah, Muhammad S.el-Hawa, Al-Nabhani dan sebagainya. Pemahaman ajaran agama dari teks-teks seperti tersebut di atas tanpa diimbangi dengan ilmu sosial dan humaniora maka akibatnya menumbuhkan keyakinan keagamaan yang monolotik. Model pendekatan keagamaan tersebut banyak dilakukan oleh intelektual dari perguruan tinggi umum. Berbeda dengan intelektual yang berbasis pendidikan ilmu agama melalui pendekatan rasional dengan bantuan ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dan diimbangi dengan kajian histories maka akan membawa pada relativisme ajaran. Pola pikir ini akan membawa kepada keterbukaan sikap untuk menerima kebenaran dari hasil penafsiran orang atau kelompok lain.

Munculnya pandangan dan gerakan radikalisme hampir selalu ditandai oleh : (a). suatu keadaan yang semakin jauh dari kondisi yang diidolakan menurut faham keagamaan; (b). tersumbatnya komunikasi antara kelompok-kelompok pengambil keputusan (pemerintah) dengan kelompok-kelompok kristis karena diantara mereka sudah tertanam rasa kecurigaan, kekhawatiran dan ancaman; (c). lunturnya kewibawaan terutama tokoh-tokoh agama, karena lebih berpihak pada penguasa atau pemerintah.

#### *Rekomendasi*

Berdasarkan temuan dan analisis data lapangan maka dapat dirumuskan beberapa

pertimbangan sebagai sebagai masukan sebagai berikut :

Untuk mengeliminasi tumbuh dan berkembangnya aliran dan gerakan radikalisme religio politik, bisa ditempuh langkah-langkah sebagai berikut (a). perlu ada kebijakan yang berpihak pada kaum lemah, sekaligus perlakuan yang adil terhadap setiap warga di muka hukum; (b). adanya keterbukaan agar terjadi komunikasi timbal balik guna memecahkan persoalan kebangsaan secara partisipatif; (c). Para tokoh agama memberikan keteladanan yang baik dan konsisten, sehingga mereka terutama kaum muda untuk mengikuti jejaknya; (d). Penyadaran kepada mereka bahwa Indonesia adalah negara yang pluralistik baik dari segi etnis maupun agama-agama yang dianut. Penyadaran itu penting untuk menyadarkan bahayanya "dominasi mayoritas dan tirani minoritas".

Langkah-langkah konkret harus dilakukan adalah :

**Pemerintah :**

Untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya ideologi dan gerakan radikalisme di masyarakat, pemerintah melakukan dialog dengan organisasi/partai politik yang berasaskan Islam secara periodik. Pendekatan dialogis tanpa mengedepankan prasangka negatif secara berlebihan, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima.

Pemerintah bersikap adil dalam bertindak dan tidak diskriminatif terhadap kelompok aliran, suku ataupun agama tertentu dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini pada gilirannya menuntut adanya penegakan hukum yang lebih berpihak kepada rakyat ketimbang pejabat.

Pemerintah melibatkan elemen masyarakat untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan mereka sendiri.

**Organisasi Masa/Organisasi Sosial Politik**

Pengurus dan anggota ormas dan orsospos dalam upaya mengembangkan dan memperteguh keberagaman dalam kehidupan bersama harus bersikap obyektif bahwa Indonesia adalah negara yang penduduknya memiliki keragaman dalam hal etnis dan keyakinan keagamaan. Artinya, setiap pemeluk agama yang berbeda itu memiliki hak hidup dan kehormatan yang sama. Oleh karena itu kualitas kehidupan sosial dan kehidupan pemerintahan yang jauh dari moralitas keagamaan, jangan dijustifikasi sebagai akibat tidak diberlakukannya syariat Islam dan memaksakan syariat Islam untuk diberlakukan kepada semua orang.

Jangan memaksakan dalam mewujudkan kehendak dengan dalih agama hanya akan merusak citra Islam, dan secara langsung akan menodai agama itu sendiri yang bersifat Rahmatan Lil Alamin.

**Perguruan Tinggi**

Pemahaman keagamaan di kalangan akademisi/ perguruan tinggi bukan hanya bersifat normatif teologis, tetapi harus melibatkan banyak pendekatan rasional dengan bantuan ilmu-ilmu sosial sebagai bahan analisisnya. Pembelajaran faham keagamaan dari teks-teks penulis yang beraliran keras tanpa diimbangi dengan pemahaman ilmu

sosial lainnya akan menyesatkan pencitraan kita terhadap hakekat Islam itu sendiri. Kurikulum dan silabi pembelajaran Agama di perguruan tinggi perlu dikaji ulang. Karenanya perguruan tinggi harus memiliki otoritas di satu sisi dan tanggung jawab di sisi lain terhadap pengembangan pemikiran tentang radikalisme melalui berbagai event wacana dan ruang untuk dialog. Kenetralan perguruan tinggi harus tetap dijaga agar tetap selalu obyektif dan jujur dalam menelaah berbagai persoalan di masyarakat, terlebih berkaitan dengan masalah radikalisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abegebriel, A Mahtuh dkk. 2004. *Negara Tuhan - The Thematic Encyclopaedia*. Jakarta : SR-Ins Publising.
- Buchori, Mochtar. 1986. *Radikalisme Agama - Sebuah Catatan Awal*. Dalam Pesantren, No. 4/Vo. III halaman 55-69.
- Burrel, RM. 1995. *Fundamnetalis Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset (Terjemahan).
- Fealy, Greg dan Borton, Greg (edsd). 1996. *Tradisionalisme Radikal - Persinggungan Nahdatul Ulama - Negara*, Yogyakarta : LkiS.
- Hasyim, Syafiq. 2002. "Fundamentalisme Islam : Perebutan dan Pergeseran Makna" dalam Afkar, Edisi No. 13 halaman 5 - 18.
- Jainuri, Ahmad. 2002. *Ideologi Kaum Reformis*, Surabaya : LPAM (Terjemahan).
- Kasdi, Abdurrahman. 2002. "Fundamentalisme Islam Timur Tengah " Akar Teologi, Kritik Wacana dan Politisasi Agama", dalam Afkar, Edisi No. 13 halaman 19-35.
- Paige, Glenn D, dkk (eds). 1997. *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta : LkiS.
- Priyono, AE. 2003. "Fenomena \*Terorisme Agama dan Kebangkitan Neo Demokrasi & Ham, Vol. 3 No. 1 Januari - April. Halaman 6-34.
- Rahmat, Jalaludin. 1984. "Fundamentalisme Islam : Mitos dan Realitas", dalam Ridwan, Prisma Ekstra. Halaman : 788-88.
- Ridwan, Nur Khalik. 2002. "Agama Borjuis Islam Fundamentalis : Berdasarkan Kasus Surakarta" dalam Afkar, edisi 13, halaman 93-103.
- Rumadi. 2002. "Jihad : Mengapa Jadi Hantu Islam ? , dalam Afkar, edisi 13 halaman 60-73.
- Suparlan, Parsudi. 1999. "Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya", dalam Antropologi Indonesia, Tahun XXIII, No. 59, Mei-Agustus, halaman 7-19.
- Wahid, Marzuki dan Nurrochman. 2002. "Dimensi Fundamentalisme dalam Konflik Formalisasi Syariat Islam", dalam Afkar, edisi, halaman 35-54.